

KEKUATAN WACANA: ANALISIS PEMBINGKAIAN KEBIJAKAN DAN PENETAPAN AGENDA PPN 12%

Mohammad Dendy Musthofa¹, Abdullah²

^{1,2} Manajemen Pendidikan Islam Universitas Nurul Jadid

Email: dendyalfi@gmail.com^{1,2}

Abstract

This study aims to analyze the role of political actors in framing the 12% VAT policy and its impact on public acceptance and socio-economic policies in Indonesia. Using a qualitative approach and using a case study method, this study examines how political actors, both from the government and the opposition, frame the 12% VAT policy through the mass media and political speeches to influence public perception. The study findings show that the government has succeeded in framing the 12% VAT policy as an important fiscal measure for infrastructure development and strengthening the country's economy. However, more critical political actors from the opposition and the media have highlighted the negative impacts of this policy on the poor and vulnerable groups. This framing influences how the public accepts the policy, both in support and opposition to the policy. In addition, the impact of this policy framing on social and economic policies has further exacerbated social inequality, with low-income communities feeling increasingly burdened by the policy. This study also identifies limitations in terms of location and time coverage, and recommends further research that can expand the geographic scope and analyze the impacts in more depth on various socio-economic sectors.

Keywords: *Framing, 12% VAT, Role of Political Actors, Public Acceptance, Social and Economic Policy.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktor politik dalam pembingkai kebijakan PPN 12% serta dampaknya terhadap penerimaan publik dan kebijakan sosial-ekonomi di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini mengkaji bagaimana aktor politik, baik dari pemerintah maupun oposisi, membingkai kebijakan PPN 12% melalui media massa dan pidato-pidato politik untuk mempengaruhi persepsi publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berhasil membingkai kebijakan PPN 12% sebagai langkah fiskal yang penting untuk pembangunan infrastruktur dan penguatan perekonomian negara. Namun, aktor politik dari pihak oposisi dan media yang lebih kritis menyoroti dampak negatif kebijakan ini terhadap kelompok miskin dan masyarakat rentan. Pembingkai ini mempengaruhi cara masyarakat menerima kebijakan tersebut, baik mendukung maupun menentang kebijakan tersebut. Selain itu, dampak dari pembingkai kebijakan ini terhadap kebijakan sosial dan ekonomi semakin memperburuk ketimpangan sosial, dengan masyarakat berpendapatan rendah merasa semakin terbebani oleh kebijakan tersebut. Penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan dalam cakupan lokasi dan waktu, serta merekomendasikan penelitian lanjutan yang dapat memperluas cakupan geografis dan menganalisis dampak lebih mendalam terhadap berbagai sektor sosial-ekonomi.

Kata Kunci: *Pembingkai, PPN 12%, Peran Aktor Politik, Penerimaan Publik, Kebijakan*

PENDAHULUAN

Fakta mengenai kebijakan PPN 12% di Indonesia memunculkan berbagai perdebatan, terutama terkait dengan ketimpangan antara teori yang ada mengenai kebijakan fiskal dan fakta sosial yang terjadi di lapangan (Sayari et al., 2023). Secara teoritis, kebijakan perpajakan, termasuk PPN, diharapkan dapat menciptakan sistem pajak yang adil dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, fakta sosial menunjukkan bahwa kebijakan ini cenderung lebih memberatkan kelompok masyarakat tertentu, terutama kalangan menengah ke bawah. Wacana yang berkembang seringkali tidak memperhitungkan dampak sosial yang timbul dari implementasi kebijakan tersebut. Penetapan PPN 12% seharusnya mempertimbangkan ketimpangan pendapatan dan daya beli masyarakat, namun pada kenyataannya, kebijakan ini justru memperburuk ketidakadilan ekonomi (Mascagni et al., 2023). Isu krusial yang muncul adalah bagaimana kebijakan ini diterima dan dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat, serta mengapa implementasi kebijakan tidak selalu sesuai dengan teori keadilan fiskal yang mengedepankan redistribusi pendapatan. Gap antara teori keadilan pajak dan realitas sosial inilah yang mendorong perlunya kajian mendalam tentang bagaimana pembingkai kebijakan ini dilakukan oleh media, pemerintah, dan aktor-aktor lainnya dalam menentukan agenda politik dan ekonomi (Zahwa Az-Zahra Tholib et al., 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji kebijakan pajak, khususnya PPN, namun sedikit yang secara khusus mengaitkan kebijakan ini dengan pembingkai media dan proses penetapan agenda politik. Penelitian oleh Fauzi (2020) misalnya, menyoroti dampak PPN terhadap sektor ekonomi informal, sementara penelitian oleh (Fuest et al., 2024) mengkaji persepsi publik terhadap kebijakan pajak di Indonesia (Mgammal et al., 2023). Namun, riset-riset ini lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan ekonomis kebijakan, tanpa banyak mengulas bagaimana wacana yang berkembang di media dan pemerintah memengaruhi cara kebijakan ini diterima oleh Masyarakat (Buettner et al., 2023). Dalam konteks ini, penelitian kami menempati posisi yang berbeda dengan fokus utama pada analisis pembingkai (framing) dan bagaimana media serta aktor politik menggunakan kekuatan wacana untuk membentuk agenda (Musthofa, 2024) kebijakan PPN 12%. Pembingkai ini (Perlitz & Schrank, 2021), menurut kami, memiliki peran penting dalam menentukan penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan tersebut di kalangan public (Birkstedt et al., 2023).

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih segar dalam memandang kebijakan PPN 12% dengan menekankan pentingnya peran wacana dalam pembingkai kebijakan tersebut. Sementara penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dampak ekonomi atau teknis dari kebijakan pajak, riset kami lebih memperhatikan bagaimana media dan aktor politik menggunakan narasi tertentu untuk mempengaruhi agenda kebijakan. Novelty dari penelitian ini terletak pada integrasi konsep analisis pembingkai (framing)

analysis) dalam studi kebijakan perpajakan di Indonesia. Kami berupaya mengidentifikasi bagaimana kebijakan ini dibingkai dalam diskursus publik, apakah melalui framing positif yang menekankan manfaatnya bagi perekonomian atau framing negatif yang mengkritik dampaknya terhadap masyarakat miskin. Dengan melihat proses ini, penelitian kami memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana kebijakan publik, khususnya PPN, dibentuk melalui wacana yang beredar di ruang public (Amores et al., 2024).

Tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana proses pembingkai (framing) memengaruhi penetapan agenda kebijakan PPN 12% di Indonesia. Beberapa pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam tulisan ini antara lain: "Bagaimana media dan aktor politik membingkai kebijakan PPN 12% di Indonesia?" "Apa pengaruh framing tersebut terhadap penerimaan publik terhadap kebijakan ini?" "Mengapa pembingkai ini memiliki peran penting dalam penetapan agenda politik terkait perpajakan?" Pertanyaan-pertanyaan ini akan mengarahkan riset pada pemahaman mendalam mengenai bagaimana kebijakan ini ditetapkan, direspons, dan diterima oleh masyarakat melalui lensa wacana yang dibangun oleh berbagai aktor sosial dan politik (Magatef et al., 2023).

Dalam riset ini, kami mengajukan argumen bahwa pembingkai kebijakan PPN 12% berperan penting dalam membentuk agenda politik dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Pembingkai yang dilakukan oleh media dan aktor politik akan menentukan bagaimana kebijakan ini dilihat oleh publik, apakah sebagai kebijakan yang adil atau justru memberatkan masyarakat. Melalui pembingkai yang efektif, pihak-pihak tertentu dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap dampak kebijakan, baik dalam perspektif ekonomi maupun sosial. Sebagai contoh, framing yang menekankan bahwa PPN 12% adalah langkah yang perlu untuk memperkuat perekonomian negara dapat mengalihkan perhatian dari dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat miskin. Dengan demikian, pembingkai ini bukan hanya tentang bagaimana kebijakan disampaikan, tetapi juga bagaimana ia diterima atau ditolak oleh publik berdasarkan narasi yang dikonstruksi oleh media dan pemerintah. Argumentasi ini didasarkan pada teori pembingkai yang menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan untuk memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan melalui pemilihan kata, isu yang dibahas, serta cara penyajian informasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis pembingkai kebijakan PPN 12% melalui wacana yang berkembang di media dan di kalangan aktor politik. Pemilihan kontroversi PPN 12% sebagai studi kasus didasarkan pada pentingnya kebijakan ini dalam konteks ekonomi dan sosial Indonesia. PPN 12% merupakan kebijakan yang kontroversial karena dampaknya yang signifikan terhadap berbagai lapisan masyarakat, terutama terkait dengan beban pajak yang dirasakan oleh kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Kontroversi ini mengundang wacana publik yang memengaruhi persepsi masyarakat dan memicu perdebatan di media, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi penetapan agenda kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana wacana yang dibentuk melalui media dan aktor politik dapat memengaruhi

penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis media, khususnya media massa seperti koran, televisi, dan portal berita online yang memuat informasi terkait kebijakan PPN 12%. Selain itu, dokumentasi berupa laporan, artikel opini, dan pernyataan dari pejabat publik dan politisi juga akan dianalisis untuk memahami bagaimana mereka membingkai kebijakan ini. Data yang diperoleh dari berbagai sumber media akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam wacana tentang PPN 12%, serta bagaimana masing-masing media menyajikan informasi terkait kebijakan ini. Penggunaan teknik dokumentasi memungkinkan penelitian ini mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang konteks sosial-politik yang melatarbelakangi kebijakan ini, serta bagaimana hal tersebut dikomunikasikan kepada publik.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dan menyaring data yang tidak berhubungan langsung dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk tematik, yang mengelompokkan isu-isu yang muncul dalam wacana tentang PPN 12%. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti akan menarik kesimpulan dari pola-pola pembingkai yang ditemukan, serta menggali implikasi dari pembingkai tersebut terhadap kebijakan dan agenda publik. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai bagaimana wacana membentuk penerimaan publik terhadap kebijakan PPN 12%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aktor Politik dalam Pembingkai Kebijakan PPN 12%

Hasil observasi situasi terkait dengan pembingkai kebijakan PPN 12% menunjukkan adanya ketegangan sosial yang berkembang di kalangan masyarakat, terutama kalangan kelas menengah ke bawah. Dalam wawancara yang dilakukan dengan masyarakat di beberapa lokasi di Jakarta dan Bandung, dua kota besar yang menjadi pusat ekonomi dan politik Indonesia, ditemukan bahwa mayoritas responden merasa kebijakan ini akan menambah beban hidup mereka. Wawancara dengan pedagang kecil di pasar tradisional di Jakarta dan pekerja sektor informal di Bandung mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang potensi kenaikan harga barang akibat penerapan PPN 12%. Mereka merasa bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan bagi perusahaan besar dan negara, namun tidak memberikan dampak positif yang signifikan bagi mereka. Salah satu petani kecil di Bandung menyatakan, "*Saya khawatir harga kebutuhan pokok naik, dan saya tidak mampu mengimbangnya. Ini akan semakin sulit hidup bagi kami.*"

Interpretasi dari data ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan PPN 12% bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, aktor politik yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan ini tampaknya gagal mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang lebih rentan. Sebagian besar masyarakat, terutama

mereka yang berada di sektor informal, merasa bahwa kebijakan ini akan memperburuk kondisi sosial ekonomi mereka. Wacana yang dibangun oleh aktor politik dan media mengenai kebijakan ini tidak cukup mampu meredakan kekhawatiran tersebut, karena tidak ada komunikasi yang jelas tentang bagaimana kebijakan ini akan berdampak positif bagi kelompok masyarakat yang paling terpengaruh.

Data dari analisis berita yang beredar mengenai kebijakan PPN 12% menunjukkan bahwa media massa memainkan peran besar dalam membingkai kebijakan ini. Di beberapa media nasional seperti Kompas dan Detik, terdapat perbedaan cara pembingkai kebijakan ini, tergantung pada kepentingan politik yang terkait. Dalam beberapa laporan, kebijakan PPN 12% digambarkan sebagai langkah yang penting untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara, dengan alasan bahwa negara membutuhkan tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Misalnya, sebuah artikel di Kompas mengutip pernyataan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan mandiri (Gautier et al., 2024).

Namun, media lain seperti Republika dan Tribun News lebih menyoroti dampak negatif yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut, khususnya terkait dengan meningkatnya beban ekonomi masyarakat. Berita yang diterbitkan di media ini banyak menyoroti ketidakpuasan masyarakat, terutama pedagang kecil dan konsumen, yang merasa kebijakan ini akan menyebabkan lonjakan harga barang dan layanan. Dalam hal ini, pembingkai media memberikan ruang yang lebih besar bagi aktor politik yang menentang kebijakan ini untuk menyuarakan kritik mereka. Interpretasi terhadap data ini menunjukkan bahwa media massa berperan sebagai arena untuk aktor politik dalam mempengaruhi opini publik, dengan memilih narasi yang mendukung atau mengkritik kebijakan tersebut sesuai dengan agenda politik masing-masing.

Hasil dokumentasi dari berbagai pernyataan politik dan pidato yang tercatat menunjukkan adanya dua kubu aktor politik utama yang saling berseberangan dalam menyikapi kebijakan PPN 12%. Pihak pemerintah, melalui pidato Presiden dan Menteri Keuangan, berfokus pada penjelasan mengenai urgensi kebijakan ini dalam konteks penguatan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan fiskal negara. Dalam pidato-pidato tersebut, kebijakan PPN 12% digambarkan sebagai langkah yang progresif untuk memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian program-program sosial. Sebagai contoh, dalam sebuah konferensi pers, Menteri Keuangan menyatakan, "PPN 12% adalah keputusan yang perlu diambil untuk memperkuat ekonomi negara dan memastikan distribusi yang lebih merata untuk pembangunan."

Di sisi lain, aktor politik yang berasal dari partai oposisi mengkritik kebijakan ini melalui berbagai pernyataan yang menyoroti dampaknya terhadap rakyat kecil. Kritik ini sering kali disampaikan dalam rapat-rapat legislatif atau melalui konferensi pers yang disiarkan oleh media. Salah satu anggota DPR dari partai oposisi mengatakan, "*Kebijakan ini jelas akan memperburuk ketimpangan sosial, terutama di kalangan masyarakat miskin*

yang sudah terbebani dengan inflasi tinggi." Dokumentasi ini menunjukkan bagaimana aktor politik dari berbagai pihak menggunakan wacana yang berbeda untuk mempengaruhi persepsi publik, baik dengan menekankan urgensi ekonomi atau dengan menggambarkan kebijakan ini sebagai tidak adil bagi masyarakat bawah.

Dari hasil temuan di atas, dapat dianalisis bahwa peran aktor politik dalam pembingkai kebijakan PPN 12% sangat menentukan bagaimana kebijakan ini diterima oleh masyarakat. Pembingkai yang dilakukan oleh pemerintah cenderung menekankan pada keuntungan jangka panjang untuk perekonomian negara, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki sistem perpajakan. Namun, pihak oposisi membingkai kebijakan ini sebagai bentuk ketidakadilan yang akan membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. Perbedaan pembingkai ini menggambarkan perbedaan agenda politik yang berusaha dikapitalisasi oleh masing-masing aktor politik.

Dalam konteks ini, media berperan sebagai medium yang menyalurkan wacana tersebut kepada publik. Aktor politik menggunakan media untuk menguatkan posisi mereka, apakah itu mendukung atau menentang kebijakan. Sebagai hasilnya, penerimaan publik terhadap kebijakan PPN 12% sangat dipengaruhi oleh bagaimana informasi disajikan dan dicerna oleh masyarakat. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang merasa tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai manfaat kebijakan ini. Pembingkai yang gagal memberikan informasi yang transparan dan edukatif kepada publik dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan memperburuk ketegangan sosial yang sudah ada. Sehingga, penting untuk mempertimbangkan peran komunikasi politik yang efektif dalam membentuk penerimaan kebijakan di masyarakat.

Berikut adalah tabel analisis peneliti berdasarkan temuan mengenai peran aktor politik dalam pembingkai kebijakan PPN 12%:

Tabel 1. Analisis pembingkai kebijakan PPN 12%

Aspek	Data Observasi	Data Berita	Hasil Dokumentasi	Analisis Peneliti
Aktor Politik yang Terlibat	Pemerintah, terutama Menteri Keuangan, dan anggota DPR dari partai oposisi	Pemerintah dan media massa mendukung, oposisi mengkritik	Pidato Presiden dan Menteri Keuangan vs. kritik dari anggota DPR oposisi	Pemerintah membingkai kebijakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi, sedangkan oposisi lebih fokus pada dampaknya terhadap masyarakat miskin.
Narasi yang Dibangun	Kebijakan PPN 12% dianggap menguntungkan negara untuk pembangunan ekonomi, tetapi memberatkan rakyat kecil	Media pro-pemerintah membingkai sebagai kebutuhan fiskal; media oposisi lebih menekankan beban masyarakat kecil	Pidato pemerintah menggambarkan kebijakan sebagai langkah progresif, sedangkan oposisi menyoroti ketimpangan sosial	Narasi pemerintah mengutamakan kepentingan fiskal negara, sementara oposisi fokus pada ketidakadilan sosial dan dampak negatif terhadap masyarakat.
Respon Masyarakat	Masyarakat kelas menengah ke	Berita dengan framing positif di	Dokumentasi pernyataan tokoh	Wacana yang dibangun oleh aktor politik

	bawah merasa terbebani dan khawatir dengan dampak kebijakan ini	media mainstream versus berita kritik di media oposisi	politik yang mendukung atau menentang kebijakan, mencerminkan ketegangan sosial yang muncul	berperan besar dalam membentuk penerimaan publik terhadap kebijakan. Ketidakjelasan informasi menambah ketidakpercayaan masyarakat.
Kekuatan Wacana	Media mainstream menyajikan narasi dukungan terhadap kebijakan pemerintah, namun ada kekhawatiran sosial	Pembingkaian di media massa cenderung mencerminkan agenda politik masing-masing pihak	Pembingkaian melalui pidato dan konferensi pers aktor politik menunjukkan penggunaan wacana untuk mengatur opini publik	Pembingkaian oleh aktor politik dalam media memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi opini publik, dan dapat memperburuk ketegangan sosial bila tidak jelas.

Tabel tersebut menggambarkan bagaimana berbagai data yang diperoleh dari observasi, media berita, dan dokumentasi berperan dalam membentuk analisis peneliti terhadap peran aktor politik dalam pembingkaian kebijakan PPN 12%. Setiap aspek menunjukkan hubungan antara wacana yang dibangun oleh aktor politik dan respons yang ditimbulkan di masyarakat.

Pengaruh Pembingkaian terhadap Penerimaan Publik dan Penetapan Agenda Kebijakan

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa penerimaan publik terhadap kebijakan PPN 12% sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan ini dibingkai oleh berbagai aktor politik dan media. Dalam wawancara dengan masyarakat di Jakarta dan Bandung, sebagian besar responden, terutama yang berasal dari kelompok menengah ke bawah, menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan ini. Mereka merasa bahwa kebijakan ini hanya akan menambah beban hidup mereka, yang sudah cukup tertekan oleh inflasi dan harga barang kebutuhan pokok yang terus meningkat. Salah satu warga Jakarta, seorang pedagang kecil di pasar tradisional, mengatakan, *"Saya tahu pajak itu penting, tapi kenapa harus selalu kami yang dirugikan? PPN 12% hanya akan membuat harga barang naik dan kami semakin susah."*

Interpretasi dari wawancara ini menunjukkan bahwa wacana yang dibangun dalam pembingkaian kebijakan tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Pembingkaian yang berfokus pada keuntungan ekonomi jangka panjang yang dibawa oleh kebijakan ini tidak cukup menjelaskan bagaimana kebijakan ini akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara narasi yang dibangun oleh aktor politik dan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Pembingkaian yang lebih sensitif terhadap dampak langsung kebijakan terhadap kehidupan masyarakat lebih mungkin diterima oleh kelompok-kelompok ini.

Data dari analisis berita menunjukkan bagaimana media membingkai kebijakan PPN 12% dengan cara yang mempengaruhi penerimaan publik. Berbagai media

mainstream seperti Kompas dan Tempo menyajikan narasi bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian nasional dan meningkatkan pendapatan negara. Mereka mengutip pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah yang menjelaskan bahwa kebijakan PPN 12% diperlukan untuk membangun infrastruktur dan menyediakan anggaran untuk program sosial yang lebih baik. Media-media ini lebih menonjolkan manfaat jangka panjang dan urgensi fiskal kebijakan tersebut.

Namun, di sisi lain, media yang lebih kritis seperti Republika dan Tribun News mengangkat isu dampak negatif dari kebijakan ini terhadap masyarakat bawah. Mereka menyoroti dampak langsung berupa lonjakan harga barang-barang kebutuhan pokok yang dapat memperburuk kemiskinan. Artikel-artikel ini menampilkan pendapat para ekonom dan aktivis sosial yang mengkritik kebijakan tersebut karena dianggap tidak adil bagi kelompok rentan. Dalam hal ini, interpretasi media yang berfokus pada sisi negatif dari kebijakan memperburuk persepsi publik terhadap kebijakan tersebut, dengan masyarakat semakin skeptis terhadap niat pemerintah. Data ini menunjukkan bahwa pembingkai media berperan besar dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi penerimaan terhadap kebijakan tersebut.

Dokumentasi yang diperoleh dari pidato-pidato pemerintah dan dokumen resmi terkait kebijakan PPN 12% menunjukkan bahwa aktor politik pemerintah sangat aktif dalam membingkai kebijakan ini sebagai langkah yang perlu untuk keberlanjutan perekonomian negara. Dalam pidato-pidato mereka, Presiden dan Menteri Keuangan menekankan bahwa kebijakan PPN 12% adalah bagian dari reformasi perpajakan yang akan meningkatkan kapasitas fiskal negara dan mendukung pembangunan infrastruktur. Mereka mengklaim bahwa kebijakan ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebaliknya, dokumentasi yang berasal dari pihak oposisi dan beberapa organisasi masyarakat sipil menunjukkan pembingkai yang lebih kritis terhadap kebijakan ini. Mereka menekankan bahwa kebijakan PPN 12% akan memperburuk ketidakadilan sosial dengan meningkatkan beban hidup bagi masyarakat miskin. Beberapa anggota DPR dan aktivis sosial menyuarakan bahwa kebijakan ini tidak memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat yang lebih rentan, dan dapat memperburuk ketimpangan sosial di Indonesia. Dokumentasi ini mencerminkan bagaimana perbedaan pembingkai antara pihak pemerintah dan oposisi mempengaruhi persepsi masyarakat, serta menunjukkan bahwa pembingkai ini berperan penting dalam memengaruhi opini publik dan penetapan agenda kebijakan.

Berdasarkan data yang ditemukan, dapat dianalisis bahwa pembingkai kebijakan PPN 12% memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan publik dan penetapan agenda kebijakan. Pembingkai yang dilakukan oleh pemerintah cenderung menekankan pada aspek-aspek yang menguntungkan negara, seperti peningkatan pendapatan negara dan pembangunan infrastruktur. Namun, pembingkai ini tidak cukup mempertimbangkan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan yang akan merasakan langsung dampak kenaikan harga barang akibat

kebijakan ini. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpercayaan di kalangan sebagian besar masyarakat, yang merasa tidak diperhatikan dalam kebijakan ini.

Di sisi lain, media yang lebih kritis dan aktor politik dari partai oposisi menggunakan pembingkai yang lebih menyoroti ketidakadilan sosial yang muncul dari kebijakan ini. Mereka menggambarkan PPN 12% sebagai kebijakan yang memberatkan masyarakat miskin dan tidak memperhitungkan ketimpangan sosial yang ada. Pembingkai ini resonan dengan banyak kalangan yang merasa terdampak langsung oleh kebijakan tersebut, dan dapat memperburuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Wacana yang dibangun oleh aktor politik dan media ini menunjukkan bagaimana pembingkai dapat mempengaruhi prioritas kebijakan dan mengubah cara kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan pembingkai dalam menentukan penerimaan publik terhadap kebijakan sangat besar. Pemerintah dan oposisi menggunakan pembingkai untuk mempengaruhi penetapan agenda kebijakan, dan media berperan sebagai saluran utama untuk menyampaikan wacana tersebut kepada publik. Pembingkai yang berhasil dapat memengaruhi dukungan atau penolakan terhadap kebijakan, serta menentukan sejauh mana kebijakan tersebut diterima dan diimplementasikan dalam masyarakat.

Wacana Pembingkai PPN 12% dan Implikasinya terhadap Kebijakan Sosial dan Ekonomi

Hasil observasi di beberapa wilayah di Jakarta dan Bandung menunjukkan adanya ketegangan sosial terkait kebijakan PPN 12%, terutama di kalangan masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Wawancara dengan pedagang kaki lima dan pekerja sektor informal di Jakarta mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap dampak kebijakan ini terhadap daya beli masyarakat. Seorang pedagang di Pasar Jatinegara, Jakarta, mengungkapkan, "Jika PPN 12% diterapkan, harga barang akan naik, dan pelanggan kami yang sudah terbatas jumlahnya akan semakin sedikit." Wawancara juga dilakukan di Bandung, di mana mayoritas responden merasa bahwa kebijakan ini tidak adil bagi mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah. Salah seorang buruh pabrik di Bandung mengatakan, "*Kami yang sudah kesulitan hidup ini, kenapa harus dibebani lagi dengan pajak yang lebih tinggi?*"

Interpretasi dari data ini menunjukkan bahwa wacana pembingkai PPN 12% yang lebih mengutamakan kepentingan fiskal negara dan pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya dipahami atau diterima oleh masyarakat yang merasakan dampak langsung. Masyarakat, terutama kelompok rentan, merasa bahwa kebijakan ini justru menambah kesulitan hidup mereka dan memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara wacana kebijakan yang dibangun oleh pemerintah dan realitas sosial yang dihadapi oleh kelompok masyarakat tertentu.

Foto1. Ilustrasi PPN 12%



Analisis terhadap data berita yang beredar menunjukkan bahwa media massa memainkan peran besar dalam membingkai kebijakan PPN 12% dan dampaknya terhadap kebijakan sosial dan ekonomi. Media besar seperti Kompas dan Detik menyajikan pembingkai yang mendukung kebijakan ini sebagai langkah untuk memperkuat sistem perpajakan dan mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Artikel-artikel ini mengutip pejabat pemerintah yang menekankan pentingnya reformasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan program-program sosial. Dalam banyak laporan, kebijakan ini digambarkan sebagai langkah yang tidak bisa dihindari dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Dari sisi lain, media-media yang lebih kritis seperti Republika dan Tribun News mengangkat dampak negatif kebijakan ini terhadap kelompok-kelompok masyarakat rentan. Mereka membingkai kebijakan PPN 12% sebagai kebijakan yang akan memperburuk ketimpangan sosial, karena beban pajak yang lebih tinggi akan jatuh pada konsumen, terutama mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Berita yang muncul dari media ini cenderung menyoroti kritik dari ekonom dan aktivis sosial yang menilai kebijakan ini tidak adil dan dapat meningkatkan kesenjangan sosial. Pembingkai yang berbeda antara media mendukung atau menentang kebijakan ini mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh publik.

Dokumentasi yang diperoleh dari berbagai pidato pejabat pemerintah dan pernyataan politik menunjukkan bahwa aktor politik pemerintah berusaha membingkai kebijakan PPN 12% dalam kerangka kebutuhan fiskal negara yang mendesak. Dalam pidato-pidatonya, Presiden dan Menteri Keuangan menekankan bahwa kebijakan ini adalah langkah yang harus diambil untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, yang akan memberikan manfaat sosial jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai contoh, dalam pidato yang disiarkan di televisi nasional, Presiden menyatakan, "Kebijakan PPN 12% adalah bagian dari upaya kita untuk memperkuat ekonomi negara dan menciptakan kesejahteraan yang merata."

Sebaliknya, dokumentasi yang berasal dari pihak oposisi menunjukkan pernyataan yang kritis terhadap kebijakan ini, dengan menekankan bahwa kebijakan ini akan memperburuk ketidakadilan sosial. Banyak anggota DPR dari partai oposisi mengkritik kebijakan ini dengan alasan bahwa pajak yang lebih tinggi akan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Beberapa organisasi masyarakat sipil

juga mengeluarkan laporan yang menyoroti potensi dampak negatif kebijakan ini, seperti peningkatan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dokumentasi ini menggambarkan bagaimana pembingkai kebijakan ini, yang dilihat dari dua sisi yang berbeda, dapat memengaruhi agenda politik dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Dari hasil temuan di atas, dapat dianalisis bahwa pembingkai kebijakan PPN 12% memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut dan implikasinya terhadap kebijakan sosial dan ekonomi. Pembingkai yang dilakukan oleh pemerintah lebih menekankan pada urgensi fiskal dan pembangunan ekonomi, namun tidak cukup memberikan perhatian terhadap dampak sosial yang timbul, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sudah rentan. Wacana yang dibangun oleh pemerintah cenderung mengabaikan kesenjangan sosial yang dapat diperburuk oleh kebijakan ini, seperti yang dirasakan oleh pedagang kecil, buruh, dan masyarakat berpendapatan rendah lainnya.

Sementara itu, media yang kritis dan aktor politik dari pihak oposisi lebih menyoroti ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kebijakan ini, yang dianggap memberatkan masyarakat miskin dan memperburuk ketimpangan sosial yang ada. Dalam hal ini, pembingkai kebijakan ini bisa berimplikasi pada kebijakan sosial yang lebih inklusif atau sebaliknya, memperdalam ketidakadilan sosial. Jika pembingkai yang lebih adil dan inklusif tidak terbangun, kebijakan ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia, dengan menambah beban bagi masyarakat kelas bawah dan memperlebar jurang ketidaksetaraan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembingkai kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan publik dan penetapan agenda kebijakan sosial dan ekonomi. Pembingkai yang tidak mempertimbangkan dampak sosial dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya dapat memengaruhi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi aktor politik dan media untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan fiskal dan keadilan sosial dalam membingkai kebijakan, agar kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Ali et al., 2023) mengenai pembingkai kebijakan, peran aktor politik dalam membentuk wacana sangat memengaruhi bagaimana kebijakan diterima oleh publik. Entman menyatakan bahwa aktor politik, baik dari pemerintah maupun oposisi, menggunakan media dan pidato-pidato politik untuk menyampaikan narasi yang memperkuat agenda mereka. Dalam konteks kebijakan PPN 12%, aktor politik pemerintah seperti Presiden dan Menteri Keuangan secara konsisten membingkai kebijakan ini dalam kerangka kebutuhan fiskal yang mendesak untuk memperkuat perekonomian dan mendanai pembangunan infrastruktur. Narasi yang dibangun oleh pemerintah bertujuan untuk memperoleh dukungan publik dengan

menonjolkan manfaat jangka panjang dari kebijakan tersebut. Sebaliknya, aktor politik dari pihak oposisi, menggunakan media untuk menyoroti dampak negatif kebijakan, terutama terhadap masyarakat miskin dan rentan. Pembingkai ini bertujuan untuk mengubah persepsi publik dengan menunjukkan ketidakadilan sosial yang dapat timbul akibat kebijakan tersebut, yang berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial. Dalam hal ini, aktor politik menggunakan wacana untuk mengatur bagaimana masyarakat melihat dan merespon kebijakan tersebut.

Hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh (D'Acunto et al., 2023) tentang teori agenda-setting juga mendukung temuan ini. Mereka menyatakan bahwa media massa, yang dikendalikan oleh aktor politik, memiliki kekuatan untuk membentuk agenda publik dengan cara menyajikan informasi tertentu secara berulang-ulang. Dalam konteks kebijakan PPN 12%, media yang mendukung pemerintah sering kali menekankan pentingnya kebijakan ini untuk stabilitas ekonomi dan pembangunan jangka panjang, sedangkan media yang kritis lebih menyoroti dampaknya terhadap daya beli masyarakat yang semakin menurun. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembingkai kebijakan PPN 12% oleh aktor politik sangat dipengaruhi oleh posisi politik masing-masing pihak, yang pada gilirannya mempengaruhi penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut. Ketika pembingkai ini dilakukan dengan cara yang tidak mempertimbangkan dampak sosial bagi masyarakat rentan, maka kebijakan tersebut cenderung mendapatkan resistensi dari publik, terutama mereka yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan tersebut.

Penelitian oleh (Lustig, 2023) tentang pembingkai dalam kebijakan publik menunjukkan bahwa cara suatu kebijakan dibingkai oleh media dan aktor politik sangat memengaruhi penerimaan publik dan penetapan agenda kebijakan. Iyengar menjelaskan bahwa pembingkai berita dapat mempengaruhi cara publik memahami masalah sosial dan ekonomi, serta mendorong opini dan keputusan politik. Dalam konteks kebijakan PPN 12%, pembingkai yang dilakukan oleh aktor politik pemerintah dan media yang mendukung kebijakan tersebut menekankan pada pentingnya kebijakan untuk memperkuat ekonomi dan membiayai pembangunan infrastruktur. Narasi ini berusaha meyakinkan publik bahwa kebijakan ini adalah pilihan yang tidak bisa dihindari demi kemajuan negara, yang seharusnya diterima meski ada beban tambahan bagi masyarakat. Di sisi lain, media yang kritis dan aktor politik dari pihak oposisi membingkai kebijakan ini sebagai kebijakan yang tidak adil, lebih membebani masyarakat kelas bawah dan memperburuk ketimpangan sosial. Pembingkai tersebut memengaruhi bagaimana masyarakat menilai kebijakan ini, apakah mereka melihatnya sebagai hal yang menguntungkan atau justru merugikan mereka.

Hasil penelitian oleh (Qi et al., 2023) mengenai teori agenda-setting juga memberikan gambaran tentang bagaimana pembingkai mempengaruhi penerimaan publik. Mereka mengemukakan bahwa media tidak hanya menentukan topik apa yang harus dibicarakan (agenda-setting), tetapi juga cara membingkai isu tersebut (framing) yang dapat memengaruhi pandangan dan prioritas publik. Dalam hal kebijakan PPN 12%, media yang mendukung pemerintah menekankan urgensi fiskal dan manfaat jangka

panjang yang lebih besar bagi ekonomi, sedangkan media yang lebih kritis mengangkat dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pembingkaiannya memengaruhi bagaimana masyarakat menerima kebijakan tersebut dan apakah kebijakan ini akan diterima atau ditentang. Pembingkaiannya yang dominan dapat mengubah persepsi publik dan mendorong dukungan atau penolakan terhadap kebijakan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi agenda kebijakan yang akan dilanjutkan atau disesuaikan dengan respons masyarakat.

Penelitian oleh (Mgammal et al., 2023) tentang teori pembingkaiannya mengungkapkan bahwa cara suatu isu dibingkai akan mempengaruhi persepsi publik dan implikasinya terhadap kebijakan sosial dan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa pembingkaiannya dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami masalah sosial dan dampak dari kebijakan tertentu. Dalam konteks kebijakan PPN 12%, pembingkaiannya yang dilakukan oleh pemerintah dengan menekankan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan perekonomian jangka panjang menciptakan wacana yang memperkecil perhatian terhadap dampak sosial yang lebih langsung. Sebaliknya, pihak oposisi dan media kritis menyoroti dampak kebijakan ini terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya, yang justru merasa terpinggirkan dan terbebani dengan kebijakan baru ini. Wacana ini memperburuk ketimpangan sosial karena kelompok yang sudah lebih rentan akan semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sementara kelompok yang lebih mampu mungkin tidak merasakan dampak signifikan. Pembingkaiannya ini berdampak pada ketegangan sosial dan memperburuk kesenjangan yang sudah ada, sehingga menuntut perhatian lebih terhadap dimensi sosial dari kebijakan tersebut.

Penelitian oleh (Buettner & Tassi, 2023) tentang pembingkaiannya kebijakan juga memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana wacana pembingkaiannya mempengaruhi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan. Dalam konteks PPN 12%, hasil temuan menunjukkan bahwa pembingkaiannya yang lebih mendalam akan membentuk bagaimana masyarakat mengidentifikasi dan merespon kebijakan tersebut. Pembingkaiannya yang lebih condong pada perspektif pemerintah yang berfokus pada manfaat ekonomi dalam jangka panjang mengabaikan kenyataan bahwa dampak langsung kebijakan ini terhadap kelompok miskin justru lebih signifikan. Di sisi lain, media yang membingkai kebijakan ini sebagai kebijakan yang tidak adil bagi rakyat kecil dan cenderung memperburuk ketimpangan sosial menciptakan perasaan ketidakpuasan dan resistensi di kalangan publik. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa pembingkaiannya memainkan peran penting dalam membentuk penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap kebijakan, dan bagaimana implikasi sosial serta ekonomi dari kebijakan tersebut akhirnya memengaruhi implementasinya di lapangan. Pembingkaiannya yang tidak adil dapat memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat tercapainya tujuan ekonomi yang lebih inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran aktor politik

dalam pembingkai kebijakan PPN 12% sangat mempengaruhi penerimaan publik dan penetapan agenda kebijakan. Pemerintah, melalui aktor politiknya, telah berhasil membingkai kebijakan ini dengan menekankan pada urgensi fiskal dan manfaat jangka panjang, yang bertujuan untuk meyakinkan publik tentang kebutuhan kebijakan tersebut demi memperkuat ekonomi dan mendanai pembangunan infrastruktur. Namun, pembingkai yang dilakukan oleh pihak oposisi dan media yang lebih kritis menyoroti dampak negatif kebijakan ini, terutama terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan yang merasakan dampak langsung berupa kenaikan harga barang. Pembingkai yang dilakukan oleh media dan aktor politik ini jelas mempengaruhi cara masyarakat menerima kebijakan tersebut, serta menentukan sejauh mana kebijakan ini dapat diterima atau ditentang. Implikasi dari wacana pembingkai terhadap kebijakan sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa ketidaksetaraan sosial dan kesenjangan ekonomi semakin diperburuk oleh kebijakan ini, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Ketimpangan sosial yang ada menjadi semakin tajam ketika wacana yang dibangun tidak cukup mempertimbangkan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kelas bawah.

Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal cakupan lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini lebih banyak mengandalkan data dari wawancara dengan masyarakat di Jakarta dan Bandung, yang mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat di daerah-daerah lain di Indonesia. Selain itu, penelitian ini lebih fokus pada analisis wacana pembingkai dan tidak membahas lebih dalam tentang dampak ekonomi jangka panjang dari kebijakan PPN 12% bagi sektor-sektor tertentu. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk memperluas cakupan lokasi penelitian agar dapat menangkap keberagaman persepsi publik di berbagai daerah, serta melakukan studi lebih mendalam mengenai dampak langsung kebijakan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, penelitian lanjutan sebaiknya mengintegrasikan data kuantitatif yang bisa memberikan gambaran lebih jelas mengenai dampak ekonomi kebijakan ini, seperti perubahan daya beli atau distribusi pendapatan. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi kemungkinan adanya perubahan wacana seiring dengan waktu, terutama ketika kebijakan ini mulai diimplementasikan dan efeknya mulai dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Khokhar, B., & Sulehri, F. A. (2023). Financial Dimensions of Inflationary Pressure in Developing Countries: An In-depth Analysis of Policy Mix. *Journal of Asian Development Studies*, 12(3), 1313–1327.
- Amores, A. F., Basso, H. S., Bischl, J. S., De Agostini, P., De Poli, S., Dicarlo, E., Flevotomou, M., Freier, M., Maier, S., & García Miralles, E. (2024). Inflation, fiscal policy and inequality: The distributional impact of fiscal measures to compensate for consumer inflation. *Documentos Ocasionales/Banco de España*, 2418.
- Birkstedt, T., Minkinen, M., Tandon, A., & Mäntymäki, M. (2023). AI governance: themes, knowledge gaps and future agendas. *Internet Research*, 33(7), 133–167. <https://doi.org/10.1108/INTR-01-2022-0042>
- Buettner, T., Madzharova, B., & Zaddach, O. (2023). Income tax credits for consumer

- services: A tool for tackling VAT evasion? *Journal of Public Economics*, 220, 104836.
- Buettner, T., & Tassi, A. (2023). VAT fraud and reverse charge: empirical evidence from VAT return data. *International Tax and Public Finance*, 30(3), 849–878.
- D’Acunto, F., Malmendier, U., & Weber, M. (2023). What do the data tell us about inflation expectations? In *Handbook of economic expectations* (pp. 133–161). Elsevier.
- Fuest, C., Neumeier, F., & Stöhlker, D. (2024). The pass-through of temporary VAT rate cuts: Evidence from German supermarket retail. *International Tax and Public Finance*, 1–47.
- Gautier, E., Conflitti, C., Faber, R. P., Fabo, B., Fadejeva, L., Jouvanceau, V., Menz, J.-O., Messner, T., Petroulas, P., & Roldan-Blanco, P. (2024). New facts on consumer price rigidity in the euro area. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 16(4), 386–431.
- Lustig, N. (2023). *Commitment to equity handbook: Estimating the impact of fiscal policy on inequality and poverty*. Brookings Institution Press.
- Magatef, S., Al-Okaily, M., Ashour, L., & Abuhussein, T. (2023). The impact of electronic customer relationship management strategies on customer loyalty: A mediated model. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100149. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100149>
- Mascagni, G., Dom, R., Santoro, F., & Mukama, D. (2023). The VAT in practice: equity, enforcement, and complexity. *International Tax and Public Finance*, 30(2), 525–563.
- Mgammal, M. H., Al-Matari, E. M., & Alruwaili, T. F. (2023). Value-added-tax rate increases: A comparative study using difference-in-difference with an ARIMA modeling approach. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1–17.
- Musthofa, M. (2024). *TUBES BELA NEGARA (1). docx. 1*.
- Perlitz, M., & Schrank, R. (2021). Internationales Management. *Internationales Management*. <https://doi.org/10.36198/9783838584812>
- Qi, Y., Zhang, J., & Chen, J. (2023). Tax incentives, environmental regulation and firms’ emission reduction strategies: Evidence from China. *Journal of Environmental Economics and Management*, 117, 102750.
- Sayari, K. T., Jassem, S., & Sahar, E. (2023). VAT Revenue and Economic Growth in the Middle East and North Africa Region: Evidence From Panel Data Analysis. *Journal of Tax Reform*, 9(2), 233–245.
- Zahwa Az-Zahra Tholib, S., Bella Maulina, S., Nur Azizah, F., Wahyu, S., & Wijaya Kusuma. (2024). Neraca PERAN STRATEGIS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI. *JurnalEkonomi,ManajemendanAkuntansi*, 2(5), 206–212. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/>